

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
NOMOR: KEP- /K/SU/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI LINGKUNGAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN,

Menimbang : a. bahwa dengan terbitnya Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-1513/K/SU/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

4. Keputusan Presiden Nomor 71/TPA Tahun 2019 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
5. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor PER-1513/K/SU/2012 tentang Pedoman Pengelolaan Kehumasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
7. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor KEP-653/K/SU/2010 tentang Standar Prosedur Layanan Informasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Mencabut Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-903/K/SU/2010 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-1303/K/SU/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-903/K/SU/2010 tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Layanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal September 2019

PELAKSANA TUGAS
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ISWAN ELMI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN
NOMOR : KEP- /K/SU/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PERTIMBANGAN LAYANAN
INFORMASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID) DI
LINGKUNGAN BADAN
PENGAWASAN KEUANGAN DAN
PEMBANGUNAN

SUSUNAN TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI DAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

A. TIM PERTIMBANGAN LAYANAN INFORMASI

1.	Sekretaris Utama
2.	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian dan Kemaritiman
3.	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan
4.	Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah
5.	Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara
6.	Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi

B. PPID BPKP DAN UNSUR PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS PPID

1.	PPID BPKP	Kepala Biro Hukum dan Komunikasi
2.	Bidang Pengelola Informasi	Kepala Pusinfowas

3.	Bidang Layanan Informasi	Kepala Bagian Komunikasi dan Informasi Biro Hukum dan Komunikasi
4.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Kepala Bagian Penelaahan dan Bantuan Hukum Biro Hukum dan Komunikasi
5.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	- Kepala Bagian Tata Usaha Biro Umum - Kepala Bidang Pengelolaan Data dan Informasi Pusinfowas

C. PPID UNIT KERJA PUSAT DAN PERWAKILAN

1.	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan	Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi dan Keuangan
2.	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi dan Sumber Daya Alam	Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Pengelolaan Energi Dan Sumber Daya Alam
3.	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan	Direktur Pengawasan Bidang Infrastruktur, Tata Ruang dan Perhubungan
4.	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan	Direktur Pengawasan Bidang Ekonomi Kreatif, Perdagangan dan Ketenagakerjaan
5.	PPID Pada Direktorat Pengawasan Bidang Kerjasama Investasi Dan Pembiayaan Pembangunan	Direktur Pengawasan Bidang Kerjasama Investasi Dan Pembiayaan Pembangunan
6.	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan	Direktur Pengawasan Bidang Pertahanan dan Keamanan
7.	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum	Direktur Pengawasan Bidang Politik dan Penegakan Hukum
8.	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana	Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Penanganan Bencana

9.	PPID Pada Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kebudayaan	Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Kebudayaan
10.	PPID pada Direktorat Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi	Direktur Pengawasan Bidang Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Reformasi Birokrasi
11.	PPID pada Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah	Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan Daerah
12.	PPID pada Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah	Direktur Pengawasan Akuntabilitas Program Lintas Sektoral Pembangunan Daerah
13.	PPID pada Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Direktur Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa
14.	PPID pada Direktorat Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah	Direktur Pengawasan Tata Kelola Pemerintah Daerah
15.	PPID pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur dan Perdagangan	Direktur Pengawasan Badan Usaha Agrobisnis, Infrastruktur dan Perdagangan
16.	PPID pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan perumahan	Direktur Pengawasan Badan Usaha Konektivitas, Pariwisata, Kawasan Industri dan perumahan
17.	PPID pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur	Direktur Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur
18.	PPID pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	Direktur Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan
19.	PPID pada Direktorat Pengawasan Badan Layanan umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Usaha Milik Desa	Direktur Pengawasan Badan Layanan umum, Badan Layanan Umum Daerah, Badan Usaha Jasa Air, Badan Usaha Milik Daerah Dan Badan Usaha Milik Desa

20.	PPID pada Direktorat Investigasi I	Direktur Investigasi I
21.	PPID pada Direktorat Investigasi II	Direktur Investigasi II
22.	PPID pada Direktorat Investigasi III	Direktur Investigasi III
23.	PPID pada Direktorat Investigasi IV	Direktur Investigasi IV
24.	PPID pada Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola	Kepala Biro Manajemen Kinerja, Organisasi dan Tata Kelola
25.	PPID pada Biro Sumber Daya Manusia	Kepala Biro Sumber Daya Manusia
26.	PPID pada Biro Keuangan	Kepala Biro Keuangan
27.	PPID pada Biro Hukum dan Komunikasi	Kepala Biro Hukum dan Komunikasi
28.	PPID pada Biro Umum	Kepala Biro Umum
29.	PPID pada Inspektorat	Inspektur
30.	PPID pada Pusdiklatwas	Kepala Pusdiklatwas
31.	PPID pada Puslitbangwas	Kepala Puslitbangwas
32.	PPID pada Pusinfowas	Kepala Pusinfowas
33.	PPID pada Pusbin JFA	Kepala Pusbin JFA
34.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Aceh	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Aceh
35.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Utara
36.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Barat
37.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Riau	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Riau
38.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Jambi	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jambi
39.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan
40.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu

41.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Lampung	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Lampung
42.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DKI Jakarta
43.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Banten	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Banten
44.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Barat
45.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Tengah
46.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Jawa Timur
47.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi DI Yogyakarta
48.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat
49.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Timur
50.	PPID pada Perwakilan BPKP Kalimantan Selatan	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan
51.	PPID pada Perwakilan BPKP Kalimantan Utara	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Utara
52.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Bali	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bali
53.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Timur
54.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan
55.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah
56.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Utara
57.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara

58.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku
59.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua
60.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau
61.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bangka Belitung
62.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Nusa Tenggara Barat
63.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Tengah
64.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat
65.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Gorontalo
66.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Maluku Utara
67.	PPID pada Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat	Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Papua Barat

PELAKSANA TUGAS
KEPALA BADAN PENGAWASAN
KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
REPUBLIK INDONESIA,

ISWAN ELMI